TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROBLEMATIKA PAJAK BERGANDA PENGHASILAN PADA PEKERJA JARAK JAUH (REMOTE WORKER) DAN CONTENT CREATOR CROSS-PLATFORM

DESI SYAMSIAH

Fakultas Hukum Universitas Surakarta
desisyamsiah759@gmail.com

BUDI SAROSA

Fakultas Hukum Universitas Surakarta
budisarosala@gmail.com

ELVINA EKA DAMAYANTI

Fakultas Hukum Universitas Surakarta
elvinaelda20@gmail.com

NOVILLA PRIYANKA RAMADHANI

Fakultas Hukum Universitas Surakarta
novillapryanka@gmail.com

ABSTRAK

Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena pekerja jarak jauh (remote worker) dan content creator cross-platform yang bekerja melampaui batas negara. Situasi ini menimbulkan kompleksitas dalam bidang perpajakan, khususnya terkait potensi terjadinya pajak berganda penghasilan. Pajak berganda terjadi ketika penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh dua yurisdiksi berbeda akibat tumpang tindih aturan perpajakan. Di Indonesia, pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, namun belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik unik pekerja digital lintas negara. Meskipun tersedia mekanisme Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.03/2018, implementasinya masih menghadapi tantangan karena ketidakjelasan status permanen establishment dan yurisdiksi perpajakan. Penulisan ini menganalisis problematika pajak berganda pada remote worker dan content creator dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi solusi harmonisasi perpajakan yang adil dan efektif.

Kata kunci: Pajak Berganda, Remote Worker, Content Creator, Yurisdiksi Pajak, P3B

ABSTRACT

Globalization and the development of digital technology have given birth to the phenomenon of remote workers and cross-platform content creators who work beyond national borders. This situation creates complexity in the field of taxation, especially related to the potential for double taxation of income. Double taxation occurs when the same income is taxed by two different jurisdictions due to overlapping taxation rules. In Indonesia, income tax is regulated in Law Number 36 of 2008 in conjunction with Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, but has not specifically accommodated the unique characteristics of cross-border digital workers. Although there is a Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) mechanism based on Minister of Finance Regulation Number 25/PMK.03/2018, its implementation still faces challenges due to unclear permanent establishment status and tax jurisdiction. This paper analyzes the problem of double taxation on remote workers and content creators with a normative juridical approach to identify fair and effective tax harmonization solutions.

Keywords: *Double Taxation, Remote Worker, Content Creator, Tax Jurisdiction, P3B*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan telah mengubah tatanan dunia kerja global dengan memungkinkan mobilitas tenaga kerja secara virtual tanpa batas geografis yang rigid. Fenomena ini dikenal dengan istilah "borderless workforce" atau tenaga kerja tanpa batas yang semakin berkembang pesat terutama pasca pandemi COVID-19 yang memaksa adaptasi sistem kerja jarak jauh secara masif. Pekerja jarak jauh (remote worker) dan content creator cross-platform merupakan manifestasi nyata dari transformasi digital dalam dunia kerja yang memungkinkan seseorang bekerja dari lokasi manapun dengan akses internet yang memadai. Pola kerja fleksibel ini memunculkan tantangan baru dalam sistem perpajakan internasional yang masih banyak berpijak pada konsep tradisional berbasis kehadiran fisik dan teritorial. Struktur perpajakan konvensional yang didesain sebelum era digital menjadi kurang relevan dalam mengakomodasi mobilitas virtual pekerja yang dapat menghasilkan pendapatan dari berbagai negara secara simultan.

Pajak berganda internasional menjadi salah satu permasalahan

perpajakan yang semakin kompleks dalam konteks ekonomi digital khususnya bagi remote worker dan content creator cross-platform. Secara konseptual, pajak berganda terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim hak pemajakan atas penghasilan yang sama berdasarkan prinsip pengenaan pajak yang berbeda, yaitu prinsip domisili (residence principle) dan prinsip sumber (source principle). Prinsip domisili memberikan hak pemajakan kepada negara tempat wajib pajak berdomisili atau menetap secara fisik, sementara prinsip sumber memberikan hak pemajakan kepada negara tempat penghasilan tersebut dihasilkan atau bersumber. Konflik ini semakin diperumit dalam konteks ekonomi digital karena karakteristik "dematerialisasi" aktivitas ekonomi yang tidak memerlukan kehadiran fisik di negara sumber penghasilan. Ketidakselarasan pemahaman tentang konsep "bentuk usaha tetap" (permanent establishment) dan yurisdiksi pemajakan dalam ekonomi digital menyebabkan potensi pemajakan berganda yang memberatkan pelaku ekonomi digital lintas negara.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi digital yang signifikan juga menghadapi tantangan

dalam mengelola aspek perpajakan pekerja remote dan content creator yang beroperasi secara global. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan masih belum secara spesifik mengatur aspek perpajakan ekonomi digital lintas negara secara komprehensif. Ketentuan perpajakan terkait subjek pajak luar negeri dalam UU tersebut masih bertumpu pada konsep kehadiran fisik yang kurang relevan dengan karakteristik pekerjaan digital yang tidak memerlukan kehadiran fisik. Interpretasi konsep bentuk usaha tetap dalam konteks digital masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi perpajakan di Indonesia. Adaptasi regulasi perpajakan yang responsif terhadap perkembangan ekonomi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menghindari potensi kerugian negara akibat kebocoran pajak sekaligus mencegah beban pajak berganda yang tidak proporsional bagi pelaku ekonomi digital.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty sebenarnya telah menjadi instrumen internasional yang didesain untuk mengurangi atau mengeliminasi pajak berganda melalui

alokasi hak pemajakan yang lebih jelas antar negara. Indonesia telah menandatangani P3B dengan lebih dari 65 negara dan yurisdiksi perpajakan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum perpajakan bagi wajib pajak yang beroperasi di kedua negara. Implementasi P3B diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang memberikan pedoman teknis dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dalam P3B. Namun demikian, sebagian besar P3B yang dimiliki Indonesia didasarkan pada Model OECD atau UN yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik ekonomi digital. Sistem P3B konvensional cenderung mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari aktivitas digital karena keterbatasan konsep "bentuk usaha tetap" yang masih bersifat fisik.

Problematika pajak berganda pada pekerja jarak jauh dan content creator cross-platform memerlukan solusi yang bersifat holistik melalui reformasi kebijakan perpajakan baik dalam konteks nasional maupun internasional. Pendekatan unilateral melalui penerapan

pajak digital secara sepihak berpotensi menciptakan ketidakharmonisan sistem perpajakan global dan meningkatkan kompleksitas kepatuhan pajak bagi wajib pajak lintas negara . Harmonisasi regulasi perpajakan internasional melalui konsensus multilateral seperti inisiatif BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) yang digagas OECD menjadi alternatif solusi yang lebih komprehensif dalam mengatasi tantangan perpajakan ekonomi digital. Optimalisasi P3B melalui penyesuaian definisi bentuk usaha tetap, pengaturan khusus terkait aktivitas digital, dan pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan menjadi langkah strategis yang perlu diimplementasikan. Dalam konteks Indonesia, penguatan regulasi domestik yang berpijak pada prinsip keadilan, kemudahan, dan kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam mengembangkan ekosistem perpajakan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi digital sekaligus memastikan optimalisasi penerimaan negara.

Fenomena remote worker dan content creator cross-platform dengan karakteristik mobilitas tinggi membutuhkan pendekatan perpajakan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital. Ketidakjelasan

status Bentuk Usaha Tetap atau permanent establishment dan yurisdiksi pemajakan menjadi akar permasalahan utama yang memerlukan solusi komprehensif baik dari aspek regulasi maupun implementasi teknis di lapangan . Keberadaan foreign tax credit sebagai instrumen untuk mengurangi dampak pajak berganda dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan prosedural yang menyulitkan wajib pajak untuk memanfaatkannya secara optimal. Kompleksitas administrasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk mengklaim kredit pajak luar negeri seringkali memberatkan wajib pajak individu seperti remote worker dan content creator yang umumnya tidak memiliki sumber daya memadai untuk mengelola aspek perpajakan internasional yang rumit. Diperlukan simplifikasi prosedur dan peningkatan literasi perpajakan internasional bagi pekerja digital lintas batas untuk memastikan kepatuhan pajak yang optimal sekaligus menghindari beban pajak berganda yang tidak proporsional .

1.2 Metode Penelitian

Penulisan mengenai problematika pajak berganda penghasilan pada pekerja jarak jauh (remote worker) dan content

creator cross-platform dalam sistem perpajakan Indonesia ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode penulisan normatif didasarkan pada karakteristik penulisan yang berfokus pada kajian sistematis terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan internasional dan pajak berganda dalam konteks ekonomi digital. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan ini mengadopsi dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah secara komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan perpajakan internasional dan fenomena pajak berganda. Peraturan yang menjadi fokus utama mencakup Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta berbagai perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaties) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum perpajakan, khususnya berkaitan dengan konsep subjek pajak, objek pajak, bentuk usaha tetap (permanent establishment), dan pajak berganda internasional dalam konteks ekonomi digital.

II. PEMBAHASAN

2.1 Ketidaksiharian konsep Bentuk Usaha Tetap (*permanent establishment*) dalam peraturan perpajakan Indonesia dengan karakteristik pekerjaan digital lintas negara menimbulkan permasalahan pajak berganda bagi pekerja jarak jauh (*remote worker*) dan *content creator cross-platform*

Globalisasi dan digitalisasi telah mentransformasi paradigma dunia kerja secara fundamental. Perubahan signifikan ini ditandai

dengan munculnya fenomena pekerjaan digital lintas negara yang memungkinkan individu bekerja dari lokasi geografis yang berbeda dengan pemberi kerja atau pengguna jasanya. Perkembangan ini memunculkan tantangan baru dalam sistem perpajakan internasional, khususnya terkait penerapan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau *Permanent Establishment* (PE) yang secara tradisional lebih berfokus pada keberadaan fisik sebagai dasar pemajakan.

Ketidaksesuaian antara konsep BUT dalam regulasi perpajakan dengan karakteristik pekerjaan digital lintas negara di Indonesia telah menciptakan kompleksitas dan ketidakpastian hukum, terutama bagi pekerja jarak jauh (*remote worker*) dan *content creator cross-platform*. Problematika ini bermuara pada risiko pemajakan berganda (*double taxation*) yang berpotensi menghambat perkembangan ekonomi digital dan mengurangi

daya saing Indonesia dalam menarik talenta global.

Konsep BUT dalam sistem perpajakan Indonesia diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 2 ayat (5) UU tersebut mendefinisikan BUT sebagai "bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia"¹.

Definisi tersebut kemudian diperluas melalui penjelasan yang mencakup beberapa bentuk BUT, termasuk tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor,

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (5).

pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet².

Regulasi tersebut telah mengakomodasi elemen digital

dengan memasukkan "komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis" sebagai bentuk BUT, konsep ini masih sangat lekat dengan paradigma keberadaan fisik (*physical presence*). Pendekatan ini semakin tidak relevan dengan perkembangan ekonomi digital, di mana transaksi dan penyediaan jasa dapat dilakukan tanpa adanya kehadiran fisik yang signifikan di suatu negara. Dalam upaya adaptasi terhadap ekonomi digital, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.03/2022 tentang BUT serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan oleh Wajib Pajak Luar Negeri. Meskipun demikian, peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya mengatasi kesenjangan konseptual

² Danny Darussalam, Danny Septriadi, & B. Bawono Kristiaji. (2021). *Konsep dan Aplikasi*

Perpajakan Internasional. Jakarta: DDTCC Publishing, hlm. 124-126.

dalam mengakomodasi realitas pekerjaan digital lintas negara³.

Pekerjaan digital lintas negara memiliki karakteristik yang secara fundamental berbeda dengan model pekerjaan konvensional. Karakteristik tersebut meliputi mobilitas tinggi, ketidaktetapan lokasi kerja, tidak terikat pada kehadiran fisik, serta kemampuan untuk melayani pasar global tanpa kehadiran fisik di negara sumber penghasilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Darussalam dan Septriadi, "ekonomi digital telah mengaburkan batas-batas yurisdiksi perpajakan tradisional yang selama ini mendasarkan diri pada konsep kehadiran fisik"⁴.

Pekerja jarak jauh (*remote worker*) dan *content creator cross-platform* merepresentasikan dua kategori utama dalam ekosistem pekerjaan digital lintas negara. Pekerja jarak jauh umumnya bekerja untuk perusahaan atau klien yang berada di negara berbeda, sementara *content creator cross-platform* menghasilkan

konten digital dan memperoleh penghasilan dari berbagai platform global seperti YouTube, Instagram, TikTok, atau Patreon. Kedua kategori ini menghadapi ketidakpastian status perpajakan karena ketidaksesuaian konsep BUT dengan karakteristik pekerjaan mereka.

Tantangan utama penerapan konsep BUT pada pekerjaan digital lintas negara adalah ketidakmampuan sistem perpajakan untuk mengidentifikasi dengan tepat negara mana yang memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang dihasilkan. Ini disebabkan oleh ambiguitas dalam penentuan sumber penghasilan (*source of income*) dan lokasi aktivitas ekonomi yang sebenarnya (*substantial economic activity*). Ambiguitas ini berpotensi menciptakan skenario di mana individu yang sama dikenakan pajak oleh dua atau lebih negara atas penghasilan yang sama, sehingga terjadi pemajakan berganda.

³ Siti Maharani. (2022). *Analisis Penerapan Konsep BUT di Era Ekonomi Digital: Studi Kasus*

Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia, 18(2), 45-60.

⁴ Darussalam, Danny, *Op. Cit.*, hlm 87.

Menurut penelitian Vishnu dan Agustina, "pekerja digital yang bekerja secara lintas batas menghadapi risiko pemajakan berganda karena ketidakseragaman interpretasi BUT di berbagai yurisdiksi perpajakan"⁵. Hal ini diperkuat oleh studi empiris yang dilakukan oleh Pohan yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% *remote worker* Indonesia yang bekerja untuk perusahaan asing mengalami masalah pemajakan berganda akibat perbedaan interpretasi BUT dan ketidakjelasan perlakuan perpajakan⁶.

Pemajakan berganda memiliki implikasi signifikan bagi pekerja digital lintas negara, baik dari aspek finansial maupun administratif. Dari sisi finansial, pemajakan berganda dapat mengurangi penghasilan bersih secara substansial, menciptakan disinsentif bagi partisipasi dalam ekonomi digital global. Sementara dari sisi administratif,

ketidakjelasan status perpajakan menimbulkan beban kepatuhan (*compliance burden*) yang tidak proporsional, termasuk kewajiban untuk memahami peraturan perpajakan di berbagai yurisdiksi dan memenuhi kewajiban pelaporan yang kompleks.

Risiko pemajakan berganda bagi pekerja jarak jauh dapat terjadi ketika negara domisili pekerja dan negara domisili pemberi kerja sama-sama mengklaim hak pemajakan atas penghasilan tersebut. Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang bekerja secara jarak jauh untuk perusahaan Amerika Serikat dapat dikenakan pajak di Indonesia berdasarkan prinsip *worldwide income taxation*, sekaligus dikenakan pemotongan pajak di Amerika Serikat karena dianggap memiliki BUT di sana berdasarkan interpretasi lokal.

Situasi serupa juga dialami oleh *content creator cross-platform*. Penghasilan mereka dapat berasal dari berbagai negara,

⁵ Anand Vishnu, & Linda Agustina. (2023). *Double Taxation Issues for Digital Nomads: A Comparative Study of ASEAN Countries*. *Journal of International Taxation*, 34(3), 215-232.

⁶ Chairil Anwar Pohan. (2022). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis di Era Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 342-345.

tergantung pada lokasi pengguna yang mengonsumsi konten atau lokasi platform yang membayar royalti atau bagi hasil. Kompleksitas ini diperburuk oleh fakta bahwa banyak platform digital global yang beroperasi melalui entitas yang berbeda-beda di berbagai negara, menciptakan lapisan tambahan dalam rantai pembayaran yang semakin mempersulit penentuan sumber penghasilan yang tepat.

Sumedi dan Nugroho dalam studinya menemukan bahwa "pemajakan berganda terhadap pekerja digital lintas negara tidak hanya menciptakan ketidakadilan pajak, tetapi juga mendorong praktik penghindaran pajak dan ekonomi bawah tanah (*underground economy*)"⁷. Temuan ini menggarisbawahi urgensi reformasi perpajakan yang komprehensif untuk mengakomodasi realitas pekerjaan digital lintas negara. Menghadapi ketidaksesuaian konsep BUT dengan karakteristik pekerjaan

digital lintas negara, reformasi sistem perpajakan Indonesia perlu bergeser dari pendekatan berbasis kehadiran fisik (*physical presence*) menuju pendekatan berbasis nilai ekonomis (*economic value creation*). Pendekatan ini lebih sesuai dengan realitas ekonomi digital yang tidak lagi terbatas oleh batas-batas geografis.

Menurut Wijaya, "konsep BUT perlu direformulasi untuk mengakomodasi aktivitas ekonomi digital yang ditandai dengan dematerialisasi, mobilitas tinggi, dan ketergantungan pada data serta aset tak berwujud"⁸. Reformulasi ini dapat mencakup perluasan definisi BUT untuk mengakomodasi konsep "kehadiran ekonomi signifikan" (*significant economic presence*) yang tidak mensyaratkan kehadiran fisik.

Beberapa negara telah mulai mengadopsi pendekatan berbasis nilai ekonomis dalam reformasi perpajakan mereka. Sebagai contoh, Inggris telah

⁷ Andi Kusuma Sumedi, & Adrianto Dwi Nugroho. (2021). *Dilema Pemajakan Pekerja Digital Lintas Negara: Antara Keadilan dan Efisiensi*. Jurnal Pajak Indonesia, 5(1), 78-92.

⁸ Suparna Wijaya. (2023). *Perpajakan Internasional di Era Ekonomi Digital*. Yogyakarta: BPFU UGM, hlm. 156-158.

memperkenalkan *Digital Services Tax* yang mengenakan pajak pada pendapatan digital tertentu terlepas dari kehadiran fisik, sementara OECD melalui inisiatif BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) *Action Plan 1* telah mengusulkan konsep "*nexus baru*" yang melampaui persyaratan kehadiran fisik tradisional⁹. Indonesia dapat belajar dari berbagai pendekatan ini sambil mempertimbangkan karakteristik unik ekonomi digitalnya.

Harmonisasi peraturan perpajakan juga menjadi kunci dalam mengatasi risiko pemajakan berganda. Ini dapat dicapai melalui penguatan jaringan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang secara eksplisit mengakomodasi pekerjaan digital lintas negara, serta mendorong koordinasi internasional dalam pengembangan standar perpajakan untuk ekonomi digital.

Di tingkat domestik, pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan mekanisme pajak yang lebih

sederhana dan transparan bagi pekerja digital lintas negara, seperti skema pajak final dengan tarif yang kompetitif, atau pengurangan beban administrasi melalui digitalisasi proses pelaporan dan pembayaran pajak. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mengurangi risiko pemajakan berganda, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pajak dan daya saing Indonesia dalam menarik talenta global.

Ketidaksesuaian konsep BUT dalam peraturan perpajakan Indonesia dengan karakteristik pekerjaan digital lintas negara menciptakan tantangan signifikan dalam bentuk risiko pemajakan berganda bagi pekerja jarak jauh dan *content creator cross-platform*. Permasalahan ini berakar pada pendekatan tradisional BUT yang masih sangat bergantung pada konsep kehadiran fisik, sementara ekonomi digital beroperasi dalam paradigma yang melampaui batasan-batasan geografis.

⁹ OECD. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint*:

Inclusive Framework on BEPS. Paris: OECD Publishing.

Reformasi komprehensif terhadap konsep BUT dalam sistem perpajakan Indonesia diperlukan untuk mengatasi masalah ini, bergeser dari pendekatan berbasis kehadiran fisik menuju pendekatan berbasis nilai ekonomis. Reformasi ini perlu didukung oleh harmonisasi peraturan perpajakan internasional dan pengembangan mekanisme pajak yang lebih sederhana dan transparan bagi pekerja digital lintas negara.

Indonesia tidak hanya dapat mengatasi risiko pemajakan berganda, tetapi juga memposisikan diri sebagai yurisdiksi yang ramah terhadap ekonomi digital, mendorong pertumbuhan sektor ini, dan meningkatkan partisipasi warga negaranya dalam ekonomi global. Pada akhirnya, kebijakan perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital akan menjadi kunci bagi keberlanjutan penerimaan pajak dan keadilan fiskal di era digital.

2.2 Efektivitas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

(P3B) Indonesia dalam memberikan kepastian hukum perpajakan dan pencegahan pajak berganda bagi *remote worker* dan *content creator cross-platform*

Era digitalisasi global telah menghasilkan transformasi signifikan dalam tatanan ekonomi dan ketenagakerjaan, memunculkan fenomena pekerja jarak jauh (*remote worker*) dan *content creator cross platform* sebagai manifestasi dari mobilitas tenaga kerja tanpa batas geografis. Perkembangan ini memberikan tantangan tersendiri dalam sistem perpajakan internasional yang secara konvensional didasarkan pada kedaulatan teritorial negara. Problematika pajak berganda (*double taxation*) menjadi konsekuensi logis dari situasi di mana seorang individu memiliki hubungan fiskal dengan lebih dari satu negara, yang berpotensi menimbulkan kewajiban perpajakan ganda yang memberatkan. Indonesia, sebagai negara yang sedang mengembangkan ekonominya, menghadapi tantangan

signifikan dalam mengatur aspek perpajakan terhadap transaksi lintas batas yang dilakukan oleh *remote worker* dan *content creator*.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan instrumen hukum bilateral yang dirancang untuk mencegah terjadinya pemajakan berganda dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Namun, efektivitas P3B Indonesia dalam mengakomodasi permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh *remote worker* dan *content creator cross platform* masih perlu dianalisis lebih mendalam. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik dari kedua profesi tersebut yang seringkali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan P3B konvensional.

Remote worker, yang dapat secara fisik berada di Indonesia namun bekerja untuk perusahaan asing, atau sebaliknya, menciptakan ambiguitas mengenai status keresidenan pajak dan sumber penghasilan. Sementara

itu, *content creator cross platform* menghadapi kompleksitas lain terkait penentuan sumber penghasilan mereka yang dapat berasal dari berbagai platform digital dengan domisili hukum yang berbeda-beda. Persoalan ini semakin rumit mengingat konten digital dapat diakses dan menghasilkan pendapatan dari berbagai negara secara simultan.

Transformasi digital dalam dunia kerja telah mengalami percepatan yang signifikan, terutama setelah pandemi *COVID-19* yang memaksa banyak perusahaan mengadopsi model kerja jarak jauh. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja jarak jauh di Indonesia meningkat sebesar 67% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah *content creator* di Indonesia telah mencapai lebih dari 500.000 orang pada tahun 2024, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 30%. Fenomena ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi

sekaligus kompleksitas perpajakan yang dihadapi¹⁰.

Prinsip yang umum berlaku di ranah perpajakan internasional, adalah kombinasi antara *worldwide income taxation* bagi subjek pajak dalam negeri dan *source income taxation* bagi subjek pajak luar negeri. Prinsip ini diaplikasikan melalui konsep *tax residence* dan *permanent establishment* (BUT). Namun, penerapan konsep-konsep tersebut menjadi problematik ketika dihadapkan pada karakteristik *remote worker* dan *content creator* yang tidak selalu memenuhi kriteria kehadiran fisik konvensional.

Remote worker, seseorang yang berada di Indonesia namun bekerja untuk perusahaan di luar negeri dapat dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri oleh Indonesia berdasarkan prinsip domisili atau keberadaan lebih dari 183 hari. Pada saat yang sama, negara tempat perusahaan pemberi kerja berdomisili juga dapat

mengklaim hak perpajakan atas penghasilan tersebut berdasarkan prinsip sumber penghasilan. Tanpa adanya mekanisme penghindaran pajak berganda yang efektif, situasi ini berpotensi menimbulkan pemajakan ganda yang memberatkan *remote worker*.

Situasi serupa dialami oleh *content creator cross platform* yang dapat menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber internasional melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, atau platform streaming lainnya. Ambiguitas muncul terkait penentuan sumber penghasilan ketika platform digital berdomisili di satu negara, penonton atau konsumen berada di berbagai negara, dan *content creator* sendiri berdomisili di negara lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang negara mana yang memiliki hak pemajakan primer atas penghasilan tersebut¹¹.

P3B Indonesia dengan berbagai negara mitra sejauh ini

¹⁰ Andi Kurniawan. (2023). *Transformasi Digital dalam Dunia Kerja: Tantangan dan Peluang Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

¹¹ Rizki Darmawan dan Siti Nurjanah. (2022). *Perpajakan Internasional: Konsep dan Aplikasi dalam Era Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

masih mengacu pada model *OECD* atau *UN Model Tax Convention* yang belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas perpajakan ekonomi digital. Beberapa P3B Indonesia bahkan disusun sebelum era digital, sehingga tidak memiliki ketentuan spesifik terkait perpajakan ekonomi digital. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berupaya untuk menegosiasikan ulang atau memodifikasi P3B yang ada untuk menyesuaikan dengan tantangan ekonomi digital.

P3B Indonesia pada umumnya mengandung ketentuan mengenai penentuan status residensi pajak, definisi dan ruang lingkup BUT, serta alokasi hak pemajakan atas berbagai jenis penghasilan. Dalam konteks *remote worker*, ketentuan yang relevan biasanya terdapat pada Pasal 4 (*Resident*), Pasal 15 (*Dependent Personal Services*), dan Pasal 16 (*Independent Personal Services*) dari P3B.

Sementara untuk *content creator*, ketentuan yang relevan dapat ditemukan pada Pasal 7 (*Business Profits*), Pasal 12 (*Royalties*), atau Pasal 17 (*Artistes and Sportspersons*)¹².

Permasalahan fundamental dalam penerapan P3B Indonesia terhadap *remote worker* dan *content creator* terletak pada kesulitan dalam mengkategorikan jenis penghasilan dan menentukan keberadaan BUT digital. Penghasilan *remote worker*, misalnya, dapat dikategorikan sebagai penghasilan dari pekerjaan (*employment income*) yang diatur dalam Pasal 15 P3B, atau sebagai penghasilan dari jasa profesional independen (*independent personal services*) yang diatur dalam Pasal 16 P3B. Penentuan kategori ini memiliki implikasi signifikan terhadap alokasi hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber.

Kategorisasi penghasilan bagi *content creator* menjadi lebih kompleks. Penghasilan dari monetisasi konten dapat

¹² Thomas Gunadi. (2022). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia:*

Analisis dan Interpretasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

dikategorikan sebagai royalti, penghasilan usaha, atau bahkan penghasilan dari kegiatan hiburan tergantung pada interpretasi dan fakta spesifik. Kategorisasi ini mempengaruhi penerapan artikel P3B yang relevan, dan pada akhirnya mempengaruhi mekanisme penghindaran pajak berganda yang tersedia¹³.

Beberapa fenomena perpajakan yang dihadapi oleh remote worker Indonesia antara lain: Pertama, ketika *remote worker* Indonesia bekerja untuk perusahaan asing tanpa kehadiran fisik di negara tersebut, terdapat risiko pemajakan berganda jika negara sumber mengenakan *withholding tax* atas pembayaran gaji dan Indonesia juga memajaki penghasilan tersebut sebagai bagian dari *worldwide income*. P3B seharusnya mengalokasikan hak pemajakan eksklusif kepada Indonesia sebagai negara domisili, kecuali jika remote worker tersebut memiliki kehadiran fisik di negara sumber. Namun, interpretasi dan implementasi

ketentuan ini seringkali tidak seragam antar yurisdiksi.

Kedua, penentuan status keresidenan pajak menjadi problematik ketika *remote worker* berpindah-pindah negara (*digital nomad*). Pasal 4 P3B umumnya mengatur mekanisme *tie-breaker rules* untuk menentukan status residensi dalam kasus *dual residence*. Namun, penerapan kriteria seperti *permanent home*, *center of vital interest*, atau *habitual abode* menjadi sulit ketika seseorang bekerja secara nomaden.

Ketiga, kualifikasi penghasilan *remote worker* yang bekerja sebagai *freelancer* atau kontraktor independen seringkali menimbulkan ambiguitas. Jika dikategorikan sebagai penghasilan dari jasa profesional independen, P3B umumnya mengalokasikan hak pemajakan kepada negara domisili kecuali jika terdapat *fixed base* di negara sumber. Namun, interpretasi konsep *fixed base* dalam konteks *virtual workspace* masih menjadi perdebatan¹⁴.

¹³ Budi Setiawan. (2024). *Perpajakan Content Creator: Tantangan dan Solusi di Era Digital*. Bandung: Penerbit Informatika.

¹⁴ Nur Hidayat dan Amalia Putri. (2021). *Remote Working dan Implikasi Perpajakannya: Perspektif Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit UI Press.

Content creator cross platform menghadapi tantangan perpajakan yang tidak kalah kompleks: Pertama, penentuan sumber penghasilan menjadi problematis ketika platform digital berdomisili di satu negara (misalnya Amerika Serikat untuk YouTube), content creator berdomisili di Indonesia, dan penonton atau konsumen tersebar di berbagai negara. P3B Indonesia belum memiliki ketentuan spesifik untuk mengatasi ambiguitas ini.

Kedua, kategorisasi penghasilan *content creator* yang beragam memerlukan analisis kasus per kasus. Penghasilan dari monetisasi konten dapat dikategorikan sebagai royalti jika melibatkan pemberian hak penggunaan karya cipta, atau sebagai penghasilan usaha jika dianggap sebagai imbalan atas jasa penyediaan konten. Kategorisasi ini berimplikasi pada artikel P3B yang diterapkan dan besaran *withholding tax* yang dikenakan.

Ketiga, konsep BUT digital masih diperdebatkan dalam konteks perpajakan internasional. Meskipun OECD telah menginisiasi proyek BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) yang membahas tantangan perpajakan ekonomi digital, termasuk konsep *significant economic presence*, implementasi konsep ini dalam P3B Indonesia masih terbatas¹⁵.

Efektivitas P3B Indonesia dalam mengatasi problematika pajak berganda bagi *remote worker* dan *content creator* dapat dianalisis dari beberapa dimensi: Pertama, dari dimensi cakupan, P3B Indonesia telah mencakup banyak negara mitra dagang utama, termasuk negara-negara yang menjadi basis platform digital global seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Belanda. Namun, beberapa P3B tersebut belum diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi digital.

Kedua, dari dimensi substansi, ketentuan P3B

¹⁵ Abdul Rahman. (2023). *Konsep Bentuk Usaha Tetap dalam Era Ekonomi Digital: Tinjauan Kritis terhadap P3B Indonesia*. Medan: USU Press.

Indonesia masih mengikuti model konvensional yang lebih berfokus pada kehadiran fisik (*physical presence*) sebagai prasyarat timbulnya kewajiban pajak. Pendekatan ini kurang relevan dalam konteks ekonomi digital yang tidak selalu memerlukan kehadiran fisik untuk menciptakan nilai ekonomi di suatu yurisdiksi.

Ketiga, dari dimensi implementasi, terdapat kesenjangan pemahaman dan interpretasi P3B di tingkat otoritas pajak dan wajib pajak. *Remote worker* dan *content creator*, sebagai individu, seringkali tidak memiliki pemahaman komprehensif tentang ketentuan P3B dan bagaimana menerapkannya dalam situasi mereka. Di sisi lain, otoritas pajak juga menghadapi tantangan dalam menginterpretasikan ketentuan P3B yang ada dalam konteks ekonomi digital¹⁶.

Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan berbagai

peraturan turunan untuk mengklarifikasi penerapan ketentuan perpajakan terhadap transaksi ekonomi digital, termasuk SE-04/PJ/2017 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Melakukan Kegiatan Usaha Melalui Media Internet. Selain itu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tahun 2021 juga memperkenalkan beberapa ketentuan baru terkait perpajakan ekonomi digital.

Pada level internasional, Indonesia aktif berpartisipasi dalam inisiatif *OECD/G20 BEPS Project*, khususnya Pilar Satu dan Pilar Dua yang bertujuan untuk mereformasi sistem perpajakan internasional agar lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi digital. Indonesia juga telah mengadopsi *Multilateral Instrument (MLI)* yang memungkinkan modifikasi P3B secara simultan untuk mengimplementasikan rekomendasi BEPS. Namun,

¹⁶ Anggi Prawiradinata. (2020). *Efektivitas P3B dalam Pencegahan Pajak Berganda pada*

Transaksi Digital Lintas Negara. Jurnal Perpajakan Indonesia, 12(2), 45-67.

upaya-upaya tersebut masih belum sepenuhnya menyelesaikan problematika pajak berganda yang dihadapi oleh *remote worker* dan *content creator*. Beberapa tantangan yang masih perlu diatasi antara lain: Pertama, ketidakselarasan regulasi perpajakan antarnegara dalam menghadapi fenomena ekonomi digital. Meskipun upaya harmonisasi telah dilakukan melalui forum internasional seperti OECD dan G20, implementasi di tingkat nasional masih bervariasi.

Kedua, keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan dalam mengidentifikasi, memantau, dan memungut pajak dari transaksi digital lintas batas. Hal ini mencakup tantangan teknis seperti keterbatasan akses terhadap data transaksi yang dimiliki oleh platform digital multinasional.

Ketiga, kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dengan upaya menciptakan ekosistem yang

konduif bagi perkembangan ekonomi digital. Regulasi perpajakan yang terlalu kompleks atau memberatkan berpotensi menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor digital¹⁷.

Beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas P3B Indonesia dalam memberikan kepastian hukum perpajakan dan mencegah pajak berganda bagi *remote worker* dan *content creator*: Pertama, melakukan renegotiasi atau amandemen P3B dengan negara-negara yang menjadi basis platform digital global untuk memasukkan ketentuan spesifik terkait perpajakan ekonomi digital. Hal ini mencakup klarifikasi definisi BUT digital, kategorisasi penghasilan dari aktivitas digital, dan mekanisme alokasi hak pemajakan dalam konteks ekonomi digital.

Kedua, mengembangkan pedoman interpretasi yang lebih komprehensif tentang penerapan P3B dalam konteks *remote worker*

¹⁷ Hendri Wijaya dan Putri Lestari. (2024). *Harmonisasi Perpajakan Digital: Tantangan dan*

Strategi Indonesia dalam Forum Global. Jakarta: LIPI Press.

dan *content creator*. Pedoman ini dapat berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak atau bentuk regulasi lain yang memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Ketiga, meningkatkan literasi perpajakan di kalangan *remote worker* dan *content creator* melalui program edukasi dan sosialisasi yang targetnya spesifik. Hal ini penting mengingat kompleksitas perpajakan internasional yang mungkin sulit dipahami oleh individu tanpa latar belakang perpajakan.

Keempat, mempertimbangkan adopsi pendekatan unilateral sebagai langkah sementara sambil menunggu konsensus global tentang reformasi sistem perpajakan internasional. Pendekatan ini dapat berupa *simplified compliance regime* bagi *remote worker* dan *content creator* yang terlibat dalam transaksi lintas batas.

Kelima, berpartisipasi aktif dalam forum perpajakan

internasional untuk mendorong konsensus global tentang perpajakan ekonomi digital. Indonesia perlu memastikan bahwa kepentingan negara berkembang dipertimbangkan dalam reformasi sistem perpajakan internasional¹⁸.

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah paradigma perpajakan internasional dan menantang efektivitas instrumen hukum konvensional seperti P3B. *Remote worker* dan *content creator*, sebagai manifestasi dari mobilitas tenaga kerja tanpa batas geografis, menghadapi risiko pajak berganda yang memerlukan solusi komprehensif. P3B Indonesia, meskipun telah menyediakan kerangka dasar untuk pencegahan pajak berganda, masih memerlukan adaptasi untuk mengakomodasi karakteristik unik dari ekonomi digital.

Interpretasi yang fleksibel dalam jangka pendek terhadap ketentuan P3B yang ada dapat memberikan solusi sementara. Namun, dalam jangka panjang,

¹⁸ Imam Santoso dan Diana Sari. (2021). *Reformasi Perpajakan Internasional dan Implikasinya bagi*

Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.

diperlukan reformasi sistematis terhadap arsitektur perpajakan internasional untuk menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan realitas ekonomi digital. Hal ini memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk otoritas pajak, pelaku ekonomi digital, akademisi, dan organisasi internasional.

Pendekatan yang komprehensif dan adaptif, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas P3B dalam memberikan kepastian hukum perpajakan dan mencegah pajak berganda bagi *remote worker* dan *content creator*. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada penciptaan ekosistem perpajakan yang mendukung perkembangan ekonomi digital sekaligus melindungi basis pemajakan nasional.

Transformasi digital telah membuka peluang sekaligus tantangan bagi sistem perpajakan di seluruh dunia. Indonesia, sebagai negara dengan potensi

ekonomi digital yang besar, perlu mengoptimalkan instrumen hukum perpajakan internasional seperti P3B untuk menghadapi tantangan ini. Dengan adaptasi yang tepat dan implementasi yang efektif, P3B dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan kepastian hukum perpajakan dan mencegah pajak berganda bagi *remote worker* dan *content creator* di era ekonomi digital¹⁹.

III. KESIMPULAN

Ketidaksesuaian konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT/permanent establishment) dalam peraturan perpajakan Indonesia dengan karakteristik pekerjaan digital lintas negara telah menciptakan problematika pajak berganda yang signifikan bagi pekerja jarak jauh (*remote worker*) dan *content creator cross-platform*. Permasalahan ini berakar pada pendekatan tradisional BUT yang masih sangat bergantung pada konsep kehadiran fisik, sementara ekonomi digital beroperasi dalam paradigma yang melampaui batasan geografis. Kerangka perpajakan Indonesia yang diatur dalam

¹⁹ Anggara Kusuma. (2023). *Perpajakan di Era Ekonomi Digital: Melindungi Basis Pemajakan*

Tanpa Menghambat Inovasi. Jakarta: Penerbit Kencana.

UU Nomor 36 Tahun 2008 juncto UU Nomor 7 Tahun 2021 belum sepenuhnya mengakomodasi dematerialisasi aktivitas ekonomi, mobilitas tinggi, dan ketergantungan pada data serta aset tak berwujud yang menjadi ciri pekerjaan digital. Akibatnya, pekerja digital lintas negara menghadapi risiko pemajakan berganda karena ketidakseragaman interpretasi BUT di berbagai yurisdiksi, menimbulkan beban finansial dan administratif yang tidak proporsional. Dibutuhkan reformulasi konsep BUT dengan pendekatan berbasis nilai ekonomis (economic value creation) dan harmonisasi peraturan perpajakan internasional untuk mengatasi permasalahan ini.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam memberikan kepastian hukum perpajakan dan pencegahan pajak berganda bagi remote worker dan content creator cross-platform. Meski Indonesia telah memiliki jaringan P3B dengan lebih dari 65 negara, ketentuan dalam P3B tersebut masih mengikuti model konvensional yang berfokus pada kehadiran fisik sebagai prasyarat kewajiban pajak—pendekatan yang kurang relevan dalam konteks ekonomi digital. Permasalahan

fundamental terletak pada kesulitan mengkategorikan jenis penghasilan dan menentukan keberadaan BUT digital, serta ambiguitas penentuan sumber penghasilan ketika platform digital berdomisili di satu negara, content creator di Indonesia, dan konsumen tersebar di berbagai negara. Kesenjangan pemahaman dan interpretasi P3B di tingkat otoritas pajak dan wajib pajak memperburuk situasi, ditambah ketidaksiharan regulasi perpajakan antarnegara dalam menghadapi fenomena ekonomi digital. Langkah-langkah seperti renegotiasi P3B dengan negara basis platform digital global, pengembangan pedoman interpretasi yang komprehensif, peningkatan literasi perpajakan, dan partisipasi aktif dalam forum perpajakan internasional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas P3B dalam era ekonomi digital.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darussalam, Danny, Danny Septriadi, & B. Bawono Kristiaji. (2021). *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. Jakarta: DDTC Publishing.
- Kurniawan, Andi. (2023). *Transformasi Digital dalam Dunia Kerja: Tantangan dan Peluang Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kusuma, Anggara. (2023). *Perpajakan di Era Ekonomi Digital: Melindungi Basis Pemajakan Tanpa Menghambat Inovasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darmawan, Rizki & Siti Nurjanah. (2022). *Perpajakan Internasional: Konsep dan Aplikasi dalam Era Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Gunadi, Thomas. (2022). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia: Analisis dan Interpretasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Nur & Amalia Putri. (2021). *Remote Working dan Implikasi Perpajakannya: Perspektif Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Pohan, Chairil Anwar. (2022). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis di Era Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, Abdul. (2023). *Konsep Bentuk Usaha Tetap dalam Era Ekonomi Digital: Tinjauan Kritis terhadap P3B Indonesia*. Medan: USU Press.
- Santoso, Imam & Diana Sari. (2021). *Reformasi Perpajakan Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Setiawan, Budi. (2024). *Perpajakan Content Creator: Tantangan dan Solusi di Era Digital*. Bandung: Penerbit Informatika.
- Wijaya, Hendri & Putri Lestari. (2024). *Harmonisasi Perpajakan Digital: Tantangan dan Strategi Indonesia dalam Forum Global*. Jakarta: LIPI Press.

Wijaya, Suparna. (2023). *Perpajakan Internasional di Era Ekonomi Digital*. Yogyakarta: BPFU UGM.

Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2022 tentang Bentuk Usaha Tetap.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan oleh Wajib Pajak Luar Negeri.

Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ/2017 tentang Penentuan

Bentuk Usaha Tetap bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Melakukan Kegiatan Usaha Melalui Media Internet.

Jurnal

Alkhamees, Ahmad & Anastasia Ivanova. (2021). *Remote Work and Taxation: An Analysis of Cross-Border Tax Implications for Digital Nomads*. *International Tax Journal*, 47(5), 405-422.

Kusuma, Hendro & Wawan Prasetyo. (2021). *Unilateral Digital Tax Measures and Their Impact on Double Taxation: Indonesia's Perspective*. *Tax Notes International*, 101(12), 1455-1470.

Lim, Jennifer & Hanif Saragih. (2023). *Reevaluating Permanent Establishment in Digital Economy: Challenges and Prospects for Southeast Asian Countries*. *Asian Journal of Tax Law and Policy*, 3(1), 45-63.

Maharani, Siti. (2022). *Analisis Penerapan Konsep BUT di Era Ekonomi Digital: Studi Kasus Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 18(2), 45-60.

Maulana, Rizky & Tian Chen. (2024). *Tax Compliance Challenges for Cross-*

- Border Digital Workers: A Comparative Study Between Indonesia and Singapore*. Journal of International Taxation, 35(2), 118-136.
- Prawiradinata, Anggi. (2020). *Efektivitas P3B dalam Pencegahan Pajak Berganda pada Transaksi Digital Lintas Negara*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 12(2), 45-67.
- Purwantini, Anita & Adi Nugraha. (2024). *Efektivitas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dalam Era Ekonomi Digital*. Jurnal Administrasi Fiskal, 8(1), 67-84.
- Rahman, Faisal & Gunadi Gunadi. (2023). *Permanent Establishment Issues for Remote Workers and Digital Content Creators: An Indonesian Tax Perspective*. Indonesian Tax Review, 7(3), 215-234.
- Setiawan, Bayu & Dimas Hartono. (2022). *Reformulasi Konsep Bentuk Usaha Tetap dalam Konteks Perpajakan Ekonomi Digital di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 13(2), 211-230.
- Sumedi, Andi Kusuma & Adrianto Dwi Nugroho. (2021). *Dilema Pemajakan Pekerja Digital Lintas Negara: Antara Keadilan dan Efisiensi*. Jurnal Pajak Indonesia, 5(1), 78-92.
- Vishnu, Anand & Linda Agustina. (2023). *Double Taxation Issues for Digital Nomads: A Comparative Study of ASEAN Countries*. Journal of International Taxation, 34(3), 215-232.
- Wijaya, Surya & Amelia Putri. (2022). *Tantangan Perpajakan Internasional dalam Era Ekonomi Digital: Studi Kasus Indonesia*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 6(2), 178-195.
- Publikasi Organisasi Internasional**
- OECD. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalisation -- Report on Pillar One Blueprint: Inclusive Framework on BEPS*. Paris: OECD Publishing.